

ANALISIS PENERAPAN BUDAYA KESELAMATAN PASIEN DI PUSKESMAS KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA NUSA TENGGERA BARAT

Nurul Hidayah, Ahmad Ahid Mudayana

*Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
ahidfkm@gmail.com*

ABSTRAK

Latar belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan budaya keselamatan pasien di Puskesmas Kecamatan Ambalawi Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Bara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* sampling dengan subjek penelitian berjumlah enam orang. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan checklist, sedangkan analisis data hasil penelitian menggunakan triangulasi sumber. **Hasil penelitian menunjukkan bahwa** fasilitas dan alat penunjang kegiatan pelayanan puskesmas belum memadai untuk keselamatan pasien.

Kata kunci: Penerapan budaya keselamatan, Puskesmas, NTB

PENDAHULUAN

Keselamatan (*Safety*) telah menjadi isu global termasuk juga untuk rumah sakit. Keselamatan pasien di rumah sakit kemudian menjadi isu penting karena banyaknya kasus *medical error* yang terjadi di berbagai negara. Setiap tahun di Amerika hampir 100.000 pasien yang dirawat di rumah sakit meninggal akibat *medical error*, selain itu penelitian juga membuktikan bahwa kematian akibat cedera medis 50% diantaranya sebenarnya dapat dicegah (Cahyono,2012).

Angka-angka penelitian rumah sakit di berbagai negara : Amerika, Inggris, Denmark, dan Australia, di temukan KTD dengan rentang 3,2-16,6 %. Dengan data-data tersebut, berbagai negara segera melakukan penelitian dan mengembangkan Sistem Keselamatan Pasien (Depkes, 2006). Kejadian tidak diharapkan (KTD) merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Besarnya kasus KTD yang terjadi di rumah sakit sebagai mana disebutkan di atas mengharuskan pihak rumah sakit harus melakukan langkah-langkah yang

lebih mengutamakan keselamatan pasien (Permenkes, 2011). Indonesia sendiri berdasarkan data insiden keselamatan pasien yang diterbitkan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKPRS) terdapat 114 laporan insiden keselamatan pasien pada tahun 2009, 103 laporan terjadi pada tahun 2010, dan 34 laporan ditahun 2011 pada tri wulan pertama (Komite Keselamatan Pasien RS, 2012).

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 3 April 2015, berhasil menemukan permasalahan yang ada di Puskesmas Kecamatan Ambalawi, masalah-masalah tersebut yaitu kurangnya kesadaran tenaga medis dalam pelaporan kesalahan tindakan medis, tidak adanya program keselamatan pasien, fasilitas pendukung pelayanan medis belum lengkap seperti alat pertolongan pertama di Instalasi Gawat Darurat seperti *nebulizer* untuk dewasa, *nekolar*, saksen dan inkubator di ruangan persalinan, tidak pernah dilakukannya pelatihan yang mengangkat budaya keselamatan pasien untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi tenaga medis yang melakukan tindakan medis. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Analisis Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Puskesmas Kecamatan Ambalawi Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan subjek dalam penelitian ini berjumlah 6 orang pegawai puskesmas yang memahami terkait topik penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa panduan wawancara. Teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek kembali data hasil wawancara pada semua subjek penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Kecamatan Ambalawi merupakan satu-satunya puskesmas yang terdapat di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Puskesmas ambalawi terletak di Dusun Tengge II, Rt/Rw 10/03, Desa Tolowata, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Ambalawi meliputi enam desa yaitu Desa Kole, Desa Rite, Desa Tolowata, Desa Tala, Desa Nipa dan Desa Mawu. Puskesmas Kecamatan Ambalawi menaungi sembilan unit poskesdes dan empat unit puskesmas pembantu yang di tempatkan pada tiap desa. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Ambalawi adalah pelayanan IGD 24 jam, rawat inap, rawat jalan, KIA 24 jam, kesehatan lingkungan dan berbagai macam pelayanan lainnya.

Penerapan Budaya Keselamatan Pasien di Puskesmas Kecamatan Ambalawi

Fasilitas dan alat

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketersediaan fasilitas dan alat tentunya memerlukan anggaran untuk keberlangsungan penerapan budaya keselamatan pasien. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....terdapat anggaran untuk pengadaan fasilitas dan alat, tetapi kami tidak berhak untuk memegang dana tersebut secara langsung, dana yang diperoleh dari pemerintah pusat disalurkan langsung dalam bentuk alat sesuai dengan permintaan yang kami sampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, tapi tidak semua alat yang kami ajukan dapat terealisasi oleh pemerintah....."(Informan A)

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan D, berikut pernyataannya:

".....kami tidak berhak untuk mengadakan alat dan fasilitas sendiri, melainkan kami hanya mengajukan permintaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terkait meskipun tidak semua alat dapat dipenuhi...."(Informan D).

Pelayanan yang berkualitas memerlukan fasilitas dan alat yang lengkap sehingga akan sangat membantu dalam pelayanan. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Sudah lengkap, dan kami juga lebih ke lapangan ketimbang di ruangan, jadi untuk fasilitasnya dan alat sangat membantu kita dalam melakukan kegiatan....." (Informan F).

Adapun beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa kekurangan fasilitas di Puskesmas Kecamatan Ambalawi dapat mempengaruhi pelayanan. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....di bilang tersedia ya.. tersedia! tapi masih ada beberapa yang kurang, contohnya di bagian IGD saja kekurangan alat penghisap lendir di paru-paru (suction), alat tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan oleh kami disini mengingat pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan darurat dan jauh dari rumah

sakit rujukan, jadi kita langsung merujuk pasiennya ke rumah sakit.... "(Informan B)

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan D, E, berikut pernyataannya

".....ada beberapa alat yang masih kurang memang di ruangan kami seperti inkubator dan alat penyedot air ketuban yang pecah dan di minum oleh bayi, sebenarnya alat-alat itu sangat kami butuhkan mengingat lokasi puskesmas yang jauh dari rumah sakit rujukan, tapi mau apa lagi kita kan tidak bisa mengadakan sendiri untuk alat-alat tersebut, karna keterbatasan biaya....."(Informan D).

".....Belum lengkap. karena kita tidak memiliki ruang khusus untuk peracikan obat, kita menggunakan ruangan loket dan meja loket farmasi untuk peracikan obat. Trus kita juga masih memerlukan rak untuk memisahkan obat-obat seperti obat keras dengan obat biasa. Karna bisa di lihat sendiri masih berantakan...."(Informan E).

Puskesmas Kecamatan Ambalawi dari segi fasilitas masih ada beberapa ruangan yang belum memenuhi standar, seperti ruangan di apotik atau farmasi Puskesmas Kecamatan Ambalawi tidak sesuai dengan Permenkes RI No. 30 tahun 2015 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Ada beberapa yang belum menurut saya, ya seperti ruang peracikan yang memakai loket, dan gudang yang agak sempit tidak sesuai dengan jumlah barang yang ada, sehingga ada beberapa obat yang tidak di tempatkan di rak atau lemari....."(Informan E).

Prosedur

Prosedur merupakan aturan yang dibuat sebagai langkah-langkah pentahapan dan urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Hasil wawancara yang dilakukan terkait dengan prosedur yang ada di puskesmas menyatakan bahwa Puskesmas Kecamatan Ambalawi hanya mengacu pada prosedur tetap yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

"....Kita hanya mengacu pada SOP yang dibuat dari Dinkes Kabupaten Bimayang mengacu pada perturan mentri, karna dari situ kami tahu bahwa kegiatan medis sudah di atur agar keamanannya terjaga..."(Informan A).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan C, B berikut pernyataannya:

".....Jadi... di puskesmas ambalawi umumnya itu kita menggunakan prosedur yang di buat oleh Dinas Kabupaten Bima karna kita ini buakan instansi swasta. Kita selalu melakukan prosedur-prosedur yang sudah di buat oleh pemerintah dan ada protapnya juga yang harus kita terapkan. Walaupun ada beberapa yang belum kita laksanakan, karna ada beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan kami di sini....."(Informan C).

"....Prosedur-prosedurnya langsung dari pusat, dan alhamdulillah kami sudah melaksanakannya,seperti pasien datang langsung kami tangani dengan cepat...."(Informan B)

Semua prosedur atau peraturan yang dibuat harus disosialisasikan kepada semua petugas sehingga dapat diterapkan. Hasil wawancara terkait dengan sosialisasi prosedur di Puskesmas Kecamatan Ambalawi sudah dilakukan lewat apel atau rapat, dan pada saat istirahat. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

"....Melalui apel pagi dan rapat dan diingatkan kembali harus melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan SOP yang ditetapkan...." (Informan A).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan C, berikut pernyataannya:

"....Ohh, selalu kita berikan sosialisasi kepada petugas, baik itu pada saat rapat atau apel pagi maupun pada saat waktu duduk-duduk di ruang pus tidak ada pasien, kami sering ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan kita....." (informan C).

Pelaksanaan prosedur perlu dilakukan *controlling* atau pengawasan, untuk melihat terlaksana apa tidaknya suatu prosedur yang sudah menjadi acuannya. Hasil wawancara dengan responden yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Ambalawi menyatakan bahwa *controlling* dari prosedur yang dilakukan oleh koordinator-koordinator perunit yang ada di Puskesmas Kecamatan Ambalawi dengan melihat langsung ke lapangan. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Saya sebagai kepala puskesmas setiap hari mengontrol setiap ruangan apakah sudah sesuai SOP atau tidak, begitupun dokter setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan SOP....."
(Informan A).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan D, berikut pernyataannya:

".....Kami sebagai bidan koordinator akan melakukan supervisi ke setiap bidan desa empat kali setahun untuk melihat atau mengecek terlaksana atau tidaknya prosedur-prosedur dan kita juga akan melakukan wawancara dengan pasien/ibu hamil terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bidan....."
(Informan D).

Kegiatan

Kegiatan pelayanan kesehatan memerlukan standar operasional prosedur sebagai acuan dalam melakukan tindakan. Bagian penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ada.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada koordinator-koordinator di semua bagian menyatakan bahwa di Puskesmas Kecamatan Ambalawi sudah melakukan kegiatan atau tindakannya sesuai dengan prosedur atau *standar operasional prosedur* (SOP). Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Iya, sudah melaksanakan prosedur. Karna saya juga menekankan kepada semua koordinator juga untuk membantu

mengingatkan agar bekerja sesuai prosedur..."(Informan A).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan C, berikut pernyataannya:

"...Sudah memenuhi standar; karna ini menyangkut nyawa maka kami harus bekerja semaksimal mungkin. Dan itu juga sebagai pertanggung jawaban kami dalam tindakan kepada pasien...."(Informan C).

Pelaksanaan kegiatan medis tentunya akan menghasilkan suatu bahaya baik buat pasien maupun buat petugas, maka dalam melakukan tindakan medis harus menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari bahaya atau kecelakaan akibat tindakan medis. Hasil wawancara yang dilakukan dengan koordinator-koordinator di semua bagian unit di puskesmas menyatakan bahwa semua petugas medis sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Ya sudah menggunakan. Seperti teman-teman di IGD,KIA dan lain-lain itu setiap pelayanan pasti menggunakan APD....."(Informan A).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan D, berikut pernyataannya:

".....Alhamdulillah kita selalu memakai APD pada saat melakukan tindakan persalinan dan lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada. Dan penggunaan APD itu sangat penting buat perlindungan kita terhadap penyakit-penyakit menular....."(Informan D)

Pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan IGD 24 jam memerlukan catatan atau jadwal pergantian *shift* kerja. Puskesmas Kecamatan Ambalawi menerapkan pelayanan IGD 24 jam, dan memiliki catatan atau jadwal *shift* kerja bagi petugas. Hasil wawancara yang dilakukan pada semua koordinator di semua unit Puskesmas Kecamatan Ambalawi menyatakan bahwa catatan atau jadwal *shift* kerjanya sudah ada dan sudah lengkap diisi oleh petugas yang piket pada saat itu. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Ada, semua lengkap untuk catatan pergantian shiftnya. Termasuk dengan rekam medisnya untuk yang ranap..."(Informan B).

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan informan D, berikut pernyataannya:

".....Ada buku operan pasien, operan alat, operan ruangan. Buku itu untuk melihat pasiennya siapa saja, sudah minum obat apa belum. ruangnya bersih apa tidak pada saat di tinggalkan oleh petugas yang shift sebelum diganti...."(Informan D).

Menghindari terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien yang dilakukan petugas farmasi di puskesmas atau rumah sakit perlu dilakukan pemusnahan obat kadaluarsa dan

pengecekan atau pemisahan terhadap obat yang masa kadaluarsanya akan berakhir. Untuk menghindari kejadian kesalahan dan untuk memastikan stok obat kadaluarsa di Puskesmas Kecamatan Ambalawi selalu melakukan pengecekan terhadap stok obat yang ada di gudang farmasi dan mengembalikan obat kadaluarsa kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Informasi tersebut diperoleh dari pernyataan informan sebagai berikut:

".....Kalau obat yang kadaluarsa kita belum pernah ada karena kita selalu mengecek setiap duakali setahun kalau ada yang sebulan atau dua bulan expired kita membuat dulu berita acaranya kemudian dikembalikan di dinas terkait. Puskesmas tidak ada pemusnahan tapi dikembalikan ke dinas terkait...." (Informan E).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Kecamatan Ambalawi tidak melakukan pemusnahan terhadap obat yang kadaluarsa tetapi akan dikembalikan ke dinas kesehatan kabupaten untuk di proses lebih lanjut. Puskesmas Kecamatan Ambalawi belum pernah memiliki stok obat yang kadaluarsa, karena pihak farmasi selalu mengecek dan apabila terdapat obat yang masa berlakunya mendekati *expired* maka akan dibuatkan berita acara dan di kembalikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

PEMBAHASAN

Budaya keselamatan pasien merupakan pondasi utama dalam menuju keselamatan pasien. Penerapan ini sejalan dengan *national patient safety agency* dan KKP-RS dalam tujuh langkah keselamatan pasien yang menekankan bahwa langkah awal menuju keselamatan

pasien adalah dengan menerapkan budaya keselamatan pasien (Nurmalia, dkk, 2013).

Fasilitas dan Alat

Fasilitas dan alat yang ada di Puskesmas Kecamatan Ambalawi diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dengan mengajukan permohonan fasilitas dan alat yang dibutuhkan di puskesmas ambalawi, tetapi tidak semua permohonan yang diajukan direalisasikan oleh dinas kesehatan kabupaten bima, tetapi sebagian besar fasilitas dan alat kesehatan yang dibutuhkan sudah tersedia di Puskesmas Kecamatan Ambalawi walaupun masih terdapat kekurangan yang berkaitan dengan fasilitas dan alat yang terdapat di Puskesmas Kecamatan Ambalawi seperti kurangnya alat penghisap lendir di paru-paru pada UGD, inkubator dan alat penyedot air ketuban di bagian KIA, ruang khusus peracikan obat di farmasi. Kekurangan yang ada dapat diminimalisir oleh petugas kesehatan dengan langsung merujuk pasien ke rumah sakit rujukan.

Kekurangan lainnya seperti tidak tersedianya alat pemadam kebakaran dan tidak tersedianya cadangan listrik di Puskesmas Kecamatan Ambalawi, kekurangan tersebut dapat diminimalisir oleh petugas kesehatan dengan menjaga keamanan lingkungan puskesmas agar terhindar dari kecelakaan kerja seperti kebakaran. Kekurangan terhadap fasilitas dan alat di puskesmas mengakibatkan kegiatan pelayanan terhadap pasien harus dilakukan di rumah sakit rujukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Kecamatan Ambalawi telah memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang belum memadai sehingga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Termasuk pula obat-obatan dan bahan medis habis pakai. Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis

tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan, serta proses pemberian pelayanan (Bustami, 2011). Pengelolaan obat dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal dapat menjamin tercapainya keselamatan pasien (Magindra, dkk, 2011). Termasuk dalam mengelola fasilitas dan alat yang terdapat di puskesmas.

Prosedur

Prosedur merupakan aturan yang dibuat sebagai langkah-langkah pentahapan dan urutan pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Puskesmas Kecamatan Ambalawi memiliki prosedur tetap (protap) yang di keluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten bima. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) di Puskesmas Kecamatan Ambalawi mengadopsi dari SOP yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Prosedur tetap (protap) yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terdiri dari 6 kriteria pokok yaitu meliputi prosedur pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana serta kompetensi petugas pelayanan, kecuali waktu penyelesaian kurang baik karena masih kurangnya petugas atau sumber daya manusia (SDM).

Menurut Novitasari, dkk (2012), pelayanan kesehatan yang optimal harus memenuhi 6 kriteria sesuai standar pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang merupakan pedoman oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dalam menyusun prosedur tetap yang diterapkan oleh Puskesmas Kecamatan Ambalawi.

Kegiatan

Salah satu faktor yang mendukung agar terlaksanan program puskesmas dan untuk menjaga keselamatan dalam kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas adalah adanya suatu prosedur yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan maupun karyawan, baik itu tenaga kesehatan medis maupun non medis. Standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu protap yang merupakan tata atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu kerja tertentu, yang dapat di terima seseorang yang berwenang atau yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan atau kondisi tertentu sehingga sesuatu kegiatan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien (Pangabean, 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Ambalawi sudah mamiliki standar operasional prosedur yang sudah di tetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap karyawan dan tenaga kesehatan baik itu petugas medis maupun non medis. SOP tersebut dibuat dengan untuk menjaga keselamatan petugas puskesmas, pasien maupun keluarga pasien yang berkunjung ke puskesmas ambalawi sehingga terbebas dari kejadian yang tidak diharapkan, kejadian nyaris cidera dan lain-lain. Penerapan SOP yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Ambalawi belum sepenuhnya di terapkan, seperti penggunaan sarung tangan pada saat pelayanan di IGD, namun hal tersebut hal tersebut sudah melakukan semua SOP yang di tentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima baik dari tindakan medis maupun tindakan non medis sehingga sampai sekarang belum ditemukan kesalahan-kesalahan dari tindakan-tindakan yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Ambalawi. SOP adalah suatu tahapan yang harus dilakukan dalam setiap melakukan kegiatan (Pangabean, 2008).

Hasil penelitian pelaksanaan SOP atau protap yang dilakukan di puskesmas ambalawi tidak lepas dari pengawasan kepala puskesmas, koordinator dan juga dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten untuk melihat terlaksana atau di patuhinya SOP atau protap yang ada. Pengawasan dilakukan dengan melihat langsung kegiatan di lapangan dan juga berdasarkan hasil laporan dari unit-unit tertentu, langkah yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Ambalawi ketika terdapat petugas yang tidak patuh melaksanakan SOP dengan baik dan benar maka akan dilakukan pembinaan dan teguran secara lisan yang dilakukan oleh atasan baik itu koordinator maupun kepala puskesmas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Fasilitas dan alat yang tersedia di Puskesmas Kecamatan Ambalawi belum sepenuhnya memadai, seperti alat pemadam kebakaran, cadangan listrik, alat penghisap cairan di paru-paru, inkubator, tempat cuci tangan, tetapi pelayanan kesehatan dan penerapan keselamatan pasien sejauh ini telah berjalan dengan baik.
2. Prosedur dalam memberikan pelayanan kesehatan dan penerapan keselamatan pasien yang digunakan oleh Puskesmas Kecamatan Ambalawi mengacu pada peraturan tetap yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
3. Kegiatan yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Ambalawi semuanya sudah mengacu pada prosedur tetap yang di berikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima baik dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
- 4.

Saran

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bima
 - a. Diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di setiap puskesmas.
 - b. Diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan terhadap petugas kesehatan guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien.
2. Puskesmas Kecamatan Ambalawi
 - a. Mengajukan penambahan fasilitas dan kelengkapan alat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.
 - b. Penambahan sumber daya manusia yang berkompeten guna untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang bebas dari kecelakaan dan kesalahan medis.
 - c. Tetap patuh dan taat melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan tetap yang di berikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bima untuk menjaga keselamatan pasien, petugas, keluarga pasien dan semua yang bearada di dalam Puskesmas Kecamatan Ambalawi guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustami, 2011, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Akseptabilitasnya*, Erlangga, Jakarta. Hal.16, 21.
- Cahyono, S.B., 2012, *Membangun Budaya Keselamatan Pasien dalam Praktik Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta. Hal.67,91,113,154.
- Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, *Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety)*, Jakarta.
- Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit , 2012, *Laporan IKP Triwulan 1*

Tahun 2011.

- Mangindra., Darmawansyah., Nurhayani., Bilqis., 2011, "Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai", *Jurnal AKK*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanudin Makassar. 1 (1). Hal 1-55.
- Novitasari, D., Mardiyono., Wachid, A., 2012, "Pelayanan Puskesmas Cukir dan Idola dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Administrasi Publik*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang. 2 (4). Hal 740-746.
- Nurmalia, D., Handiyani, H., Pujasari, H., 2013, "Pengaruh Program Monitoring Terhadap Penerapan Budaya keselamatan Pasien", *Jurnal Manajemen Keperawatan*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Diponegoro Semarang. 1 (2). Hal 79-88.
- Pangabea, R., 2008, Hubungan Pengetahuan dan Sikap Petugas Laboratorium Terhadap Kepatuhan Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Puskesmas Kota Pekanbaru, *Tesis*, universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.75, 2014, Pusat Kesehatan Masyarakat, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1691, 2011, Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Jakarta.
- Siriyei, I., Wulandari, R., D., 2013, "Faktor Determinan Pencapaian Cakupan Standar Pelayananminimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Mojo Kota Surabaya" *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya. 1 (3). Hal 244-251.